

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTA SOLOK
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2021**

No. Register : 419/FHUK-UMMY/IX-2021

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI KOTA SOLOK**

**Nama : Deddy Irawan, NPM : 171000474201050, Fakultas Hukum
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Dosen Pembimbing I Yulfa
Mulyeni,SH,MH, Pembimbing II Eri Arianto,SH,MH, Tahun 2021, Hal
72.**

ABSTRAK

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur urusan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Pasal 1 angka 8 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dengan rumusan masalahnya yaitu: 1)Bagaimanakah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 dalam mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok? 2)Apa kendala yang timbul dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok? 3)Serta Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pasar Raya Kota Solok dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok? Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Empiris artinya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Berdasarkan hasil Penelitian di Dinas Pasar Kota Solok dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok yaitu Peran Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk mengembalikan tata ruang kota seperti semula karena banyaknya Pedagang Kaki Lima yang telah merusak kebersihan serta citra dari Penataan Kota Solok. Faktor yang menghambat penerapan Peraturan Daerah yaitu kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat serta ketidakpedulian masyarakat akan aturan-aturan yang dibuat demi ketertiban Pedagang Kaki Lima. Upaya yang dilakukan Dinas Pasar dalam menerapkan Peraturan Daerah yaitu dengan memberikan fasilitas seperti lokasi kepada Pedagang Kaki Lima sesuai dengan aturan Peraturan Daerah serta mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima kepada para Pedagang Kaki Lima tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Amin Ibrahim, *otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Amiroeddin Sjarif, *Perundang Undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, PT Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992
- Dann Sugandha, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2014
- Dandang Juliantara, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, Pokok Edukasi , Solo, 2004
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Henny Purwanti dan Misnarti, *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, Kabupaten Lumajang, 2012
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Kansil dan Christine, *Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2009
- Mariah Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007

Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,

PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1990

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Mandar

Maju, Bandung, 1998

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

2013

2. Peraturan Perundang- undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Daerah

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Solok

